

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian Kalimantan Timur Tahun 2017 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2018 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik Perekonomian Daerah. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian Kalimantan Timur berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2018 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

Kebijakan perekonomian daerah sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah perlu didukung dengan pola penggunaan anggaran pembangunan. Dengan kata lain, diperlukan optimalisasi penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dapat dijadikan dasar penentuan penyusunan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah.

Sehubungan dengan hal di atas, kegiatan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kegiatan tersebut merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan suatu daerah secara menyeluruh.

Rancangan kerangka ekonomi makro daerah akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah pada tahun sebelumnya dan memperkirakan kondisi ekonomi dalam melaksanakan pembangunan pada tahun 2018. Selain itu, pada rancangan ekonomi makro daerah juga memperkirakan kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian target kinerja pemerintah tahun 2018.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJMD 2011-2015. Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2018 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi

nasional tahun 2018. Berikut arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2018 yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi :

- a. Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi dan efektivitas kebijakan sektor riil. Pemilihan potensi komoditas unggulan sebagai basis pengembangan wilayah merupakan bagian terpenting dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dari UMKM akan terus dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan terus melakukan peningkatan sumberdaya manusia dalam hal manajerial maupun teknis untuk mendorong penguatan daya saing produk, fasilitasi kemudahan dalam akses permodalan bagi UMKM, fasilitasi promosi produk produk industri dan promosi pariwisata untuk mendatangkan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara;
- b. Mendorong peningkatan pemerataan distribusi pendapatan melalui percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan penciptaan keseimbangan pembangunan di setiap wilayah. Pengembangan kawasan-kawasan khusus seperti pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan sentra-sentra produksi andalan pada sektor-sektor potensial, percepatan pembangunan pertanian melalui program revitalisasi pembangunan pertanian dan pembangunan perdesaan melalui peningkatan produksi pangan, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan diversifikasi usaha di perdesaan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperluas cakupan program pembangunan yang berbasis masyarakat, pengembangan produk unggulan (*core business daerah*) yang meliputi: agribisnis, industri manufaktur, dan pariwisata.
- c. Meningkatkan investasi daerah yang mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar. Beberapa langkah yang ditempuh dalam menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu atap, membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah, meningkatkan produktivitas dan akses UMKM pada sumberdaya produktif serta mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak multiplier yang tinggi terhadap pendapatan masyarakat.
- d. Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian daerah untuk penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, dan optimalisasi pemanfaatan dana program-program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pangan dilakukan upaya peningkatan ketahanan pangan melalui pemberdayaan lumbung desa untuk mewujudkan desa mandiri pangan, dan diversifikasi pangan.

- e. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Cakupan sarana dan prasarana dasar tersebut diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar di bidang kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, pekerjaan umum, perhubungan dan irigasi. Selain itu, prasarana yang dibangun juga ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan maka perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya pemantauan kualitas lingkungan dan rehabilitasi lahan serta penerapan sanksi bagi pelanggar masalah lingkungan.

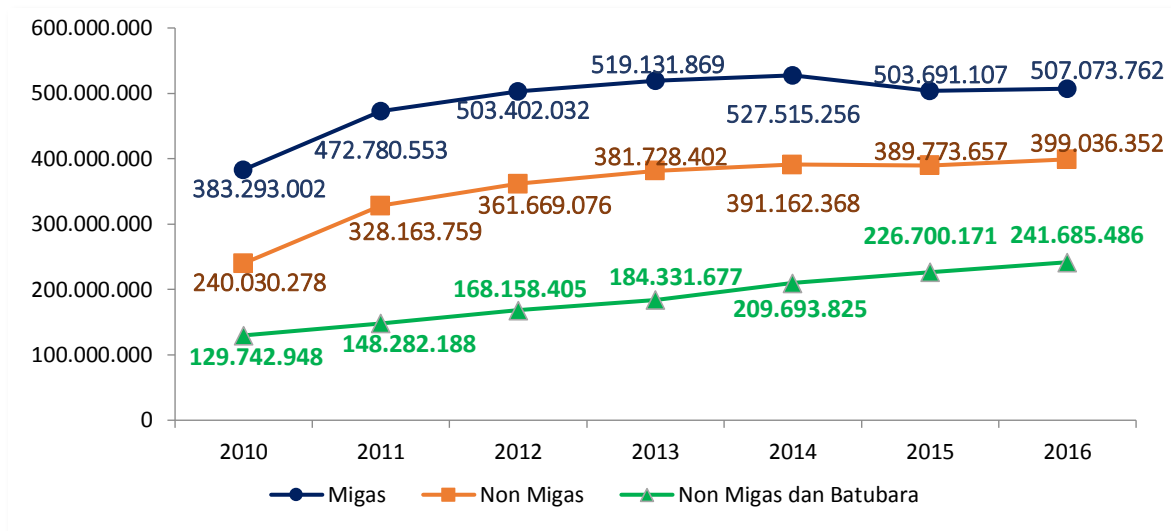
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

Salah satu indikator utama yang digunakan untuk melakukan analisis perekonomian daerah adalah dengan melakukan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Analisa perekonomian daerah dapat dilakukan dengan menganalisa dinamika dan struktur PDRB.

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Provinsi Kalimantan Timur akan menggambarkan kemampuan, potensi ekonomi dan kinerja perekonomian daerah, baik dalam pengelolaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur, selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya pada periode tahun 2010 sampai tahun 2014 mencapai angka 527,52 trilyun rupiah. Namun pada tahun 2015 pergerakannya terlihat semakin melambat dan bahkan menurun dengan besaran nilainya menjadi 507,07 trilyun rupiah. Penurunan nilai PDRB paling drastis terjadi pada sektor migas, sedangkan nilai PDRB non migas dan batubara tetap meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dari nilai PDRB tersebut, tampak jelas bahwa PDRB Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalan serta industri pengolahan yang terkait batubara dan migas. Tingginya dominasi sektor sumber daya alam tak terbaharui terhadap pembentukan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur menimbulkan gejolak perekonomian dan secara langsung mempengaruhi kinerja pembangunan daerah.

Gambar 3.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016 (Juta Rupiah)

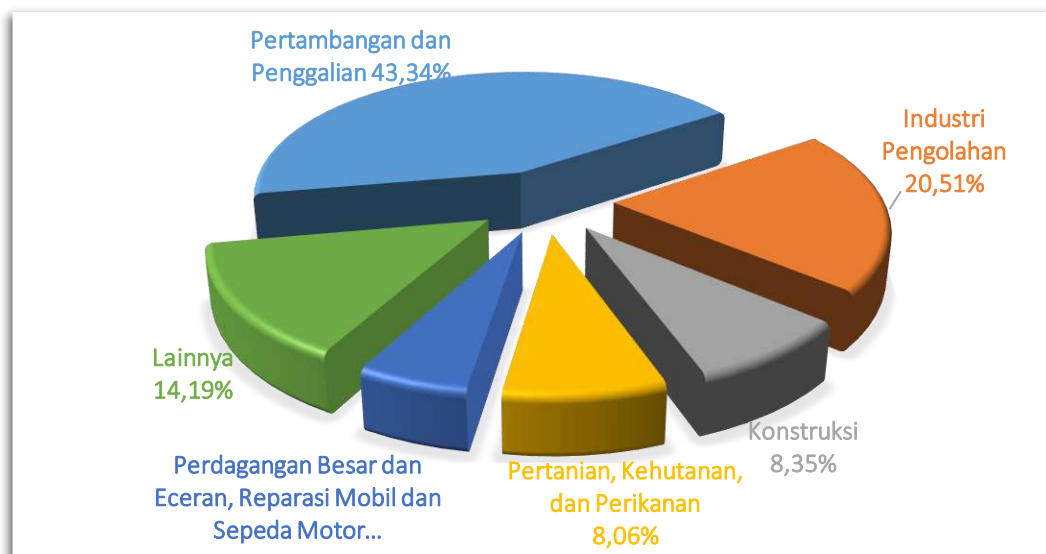


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

B. Struktur Ekonomi Daerah

Dilihat dari struktur PDRB Kalimantan Timur Tahun 2016 yang tersaji pada gambar 3.2, sektor pertambangan dan penggalan merupakan sektor yang mendominasi pembentukan PDRB Kalimantan Timur dengan kontribusi sebesar 43,34%, disusul sektor Industri Pengolahan sebesar 20,51%. Sedangkan sektor pertanian yang merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan sektor yang diharapkan menjadi sektor penopang ekonomi daerah yang berkelanjutan hanya memberikan kontribusi sebesar 8,06%.

Gambar 3.2
Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 (Persen)



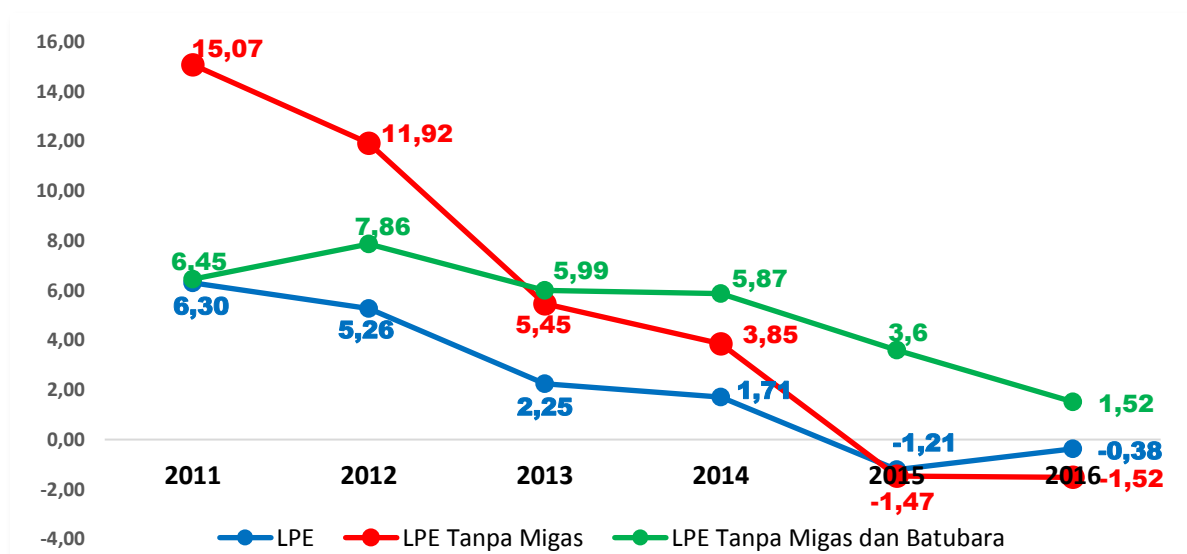
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

C. Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan daerah secara valid. Indikator ini dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan perencanaan pembangunan ke depannya karena indikator ini dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara periodik dari waktu ke waktu dan membantu dalam mengidentifikasi sektor lapangan usaha potensial yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi.

Hal menarik terkait perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur adalah bahwa pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, walaupun kontribusi Provinsi Kalimantan Timur terhadap PDB nasional masih tinggi. Namun yang perlu digarisbawahi, meskipun kontribusi PDRB Kalimantan Timur terhadap PDB Nasional masih tergolong tinggi, secara struktur pembentukannya dipengaruhi oleh sektor migas dan batubara yang terus menurun kinerjanya setiap tahun sebagai dampak dari lesunya permintaan dan harga komoditi dipasar internasional.

Gambar 3.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2011-2016 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur mengalami perlambatan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi hanya sebesar -1,21 persen, melambat dari tahun sebelumnya yang mencapai 1,71 persen. Perlambatan ini sebagian besar dikarenakan terjadinya pertumbuhan negatif pada sektor yang memberikan kontribusi signifikan dalam struktur perekonomian daerah, yaitu kategori pertambangan dan penggalian (-3,52%). Hal ini terlihat pada laju pertumbuhan ekonomi jika dikeluarkan sektor yang terkait batubara dan migasnya mencapai

3,60 persen. Pada tahun 2016, ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tumbuh negatif sebesar -0,38 persen sebagai akibat dari penurunan laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 43,34 persen, jauh di bawah pertumbuhan tahun 2015 sebesar 45,16 persen. Jika dilihat berdasarkan kategorinya, pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada kategori pengadaan listrik dan gas (21,24%) serta jasa pendidikan (12,23%).

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2016 (persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014 ^{*r}	2015 ^{*r}	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,44	6,78	4,55	0,46
B	Pertambangan dan Penggalian	1,85	(0,40)	(4,89)	(3,52)
C	Industri Pengolahan	(1,81)	0,45	2,66	5,46
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,56	21,24	30,43	8,32
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,26	4,55	2,56	6,57
F	Konstruksi	4,91	6,33	(0,94)	(3,41)
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,26	5,13	1,42	2,75
H	Transportasi dan Pergudangan	6,51	7,26	2,76	3,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,34	5,65	5,33	3,67
J	Informasi dan Komunikasi	9,11	8,45	7,66	7,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	14,37	2,41	2,05	1,83
L	Real Estat	8,23	8,29	3,59	(0,83)
M,N	Jasa Perusahaan	8,22	8,29	(3,75)	(4,25)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,74	9,29	4,20	(3,05)
P	Jasa Pendidikan	18,74	12,23	9,88	7,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,12	9,03	10,53	9,31
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,24	7,38	8,81	9,65
Laju Pertumbuhan Ekonomi		2,25	1,71	(1,21)	(0,38)

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2013-2016 (tahun dasar 2010) terus mengalami perlambatan secara berurutan pada tahun 2013 sebesar 2,25 %, tahun 2014 sebesar 1,71%, tahun 2015 sebesar -1,21%, dan tahun 2016 sedikit membaik dari tahun 2015 menjadi -0,38 %.

Ekonomi Kalimantan Timur tahun 2017 dan 2018 diperkirakan akan terus mengalami perbaikan namun masih terbatas. Dari dalam negeri, RDMP (Refinery Development Masterplan Program) yang saat ini tengah dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) diperkirakan akan menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan perekonomian Kalimantan Timur Tahun 2017 dan 2018, khususnya pada sektor konstruksi dan Pembentukan Modal Tetap Bruto.

Disisi lain, APBD tahun anggaran 2017 Provinsi Kalimantan Timur tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan anggaran tahun sebelumnya sehingga kemampuan fiskal Kalimantan Timur tahun 2017 diperkirakan sangat terbatas. Sedangkan dari sisi eksternal, ekspor luar negeri diperkirakan mengalami perbaikan pada tahun 2017 dan 2018 namun masih berada dalam fase perlambatan.

Perlambatan ekonomi ini disebabkan oleh menurunnya kinerja sektor dominan dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sektor pertambangan dan penggalian. Menurunnya produksi sektor tambang ini merupakan dampak dari perlambatan ekonomi Tiongkok dan India yang merupakan negara tujuan ekspor utama batubara Kalimantan Timur.

Tabel 3.2
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Ekonomi	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	1,57	-1,28	1±1	1±1	0,5±1
2	Inflasi	7,4	4,9	4±1	4±1	4±1

Pertambangan migas juga mengalami penurunan *lifting* pada empat tahun terakhir, sehingga menyebabkan menurunnya kinerja industri pengolahan migas di Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2014, sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan negatif. Hal ini didorong oleh kinerja positif sektor pertanian, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor perdagangan, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor konstruksi. Sementara itu dari sisi permintaan, laju perekonomian Provinsi Kalimantan Timur didorong oleh kinerja pengeluaran konsumsi rumah tangga dan investasi.

Pada tahun 2016, perekonomian Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan negatif -0,38 persen sebagai akibat adanya penurunan kinerja yang cukup signifikan pada sektor pertambangan dan penggalian hingga -3,52 persen. Selain itu, pada sektor konstruksi dan jasa perusahaan juga mengalami pertumbuhan negatif, masing-masing sebesar -3,41 persen dan -4,25 persen. Penurunan kinerja pada sektor konstruksi dan jasa perusahaan merupakan imbas dari penurunan produksi di sektor pertambangan dan penggalian. Di sisi lain, sektor-sektor ekonomi lainnya mengalami pertumbuhan positif, namun kinerja positif tersebut tidak mampu mengimbangi penurunan kinerja sektor pertambangan dan penggalian yang berpengaruh cukup signifikan.

D. Nilai PDRB dari Sisi Permintaan

Provinsi Kalimantan Timur merupakan wilayah yang perekonomiannya mengandalkan kinerja komoditas ekspor barang, terutama ekspor sektor primer, seperti: batubara, minyak bumi, dan gas alam. Barang-barang ekspor primer tersebut merupakan bagian dari sumber daya alam yang tak terbarui dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memproduksi kembali, oleh karena itu

dalam pemanfaatannya, pemerintah daerah harus memiliki kebijakan-kebijakan yang strategis untuk dapat melakukan restrukturisasi perekonomian wilayah dari dominasi sektor yang berbasis sumber daya tak terbarukan menjadi ekonomi yang berbasis sektor dapat diperbaharui dan berkelanjutan.

Tabel 3.3
PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2016 (Rp. Juta)

KATEGORI PENGGUNAAN	2013	2014	2015	2016
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	73.396.421,73	80.180.286,67	86.563.223,85	90.750.792,91
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.766.359,98	2.090.680,95	2.460.192,02	2.439.025,31
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	20.281.615,33	23.523.174,00	25.079.715,17	24.143,516
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	129.083.647,03	139.830.347,87	145.766.483,58	144.794.383,71
5. Perubahan Inventori	9.842.941,81	23.344.421,20	5.771.865,95	1.922.886,69
6. Ekspor Luar Negeri	371.841.805,18	350.299.171,85	256.979.357,18	197.483.434,72
7. Impor Luar Negeri	110.413.720,41	119.093.437,40	88.717.185,71	65.089.941,02
8. Net Ekspor Antardaerah	23.332.798,23	38.340.610,95	69.787.454,56	110.629.663,71
P D R B	519.131.868,87	527.515.256,10	503.691.106,60	507.073.762,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Dasar 2010 (Tanpa Kaltura)

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan PDRB menurut penggunaannya dapat dilihat dari beberapa kategori sebagaimana tampak pada tabel di atas. Dilihat dari kategori pengeluaran, pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 86,56 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp. 90,75 triliun pada tahun 2016. Demikian pula pengeluaran Konsumsi Pemerintah atas dasar harga berlaku, terjadi peningkatan Rp. 24,6 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp. 24,39 triliun pada tahun 2016. Besaran nilai investasi yangunjukkan oleh nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Provinsi Kalimantan Timur hingga akhir tahun 2016 lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2016, nilai PMTB sebesar Rp. 144,79 triliun, sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp. 145,77 triliun.

Lebih lanjut, dilihat dari nilai ekspor dan impor, penurunan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016, terjadi akibat melambatnya kinerja ekspor luar negeri ke beberapa negara maju dan negara dengan pendapatan menengah yang juga tengah mengalami perlambatan ekonomi. Perlambatan ekonomi di negara-negara tersebut terjadi akibat pelemahan harga dan permintaan komoditas dunia (terutama minyak), melemahnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok, serta melemahnya konsumsi domestik. Terjadinya ketidakstabilan ekonomi global di pasar internasional berdampak negatif terhadap perekonomian wilayah Indonesia. Meskipun demikian, perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki catatan positif, yaitu terjadi surplus pada komponen net ekspor antardaerah sebanyak Rp 110,63 triliun. Nilai net ekspor tersebut lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 69,79 triliun.

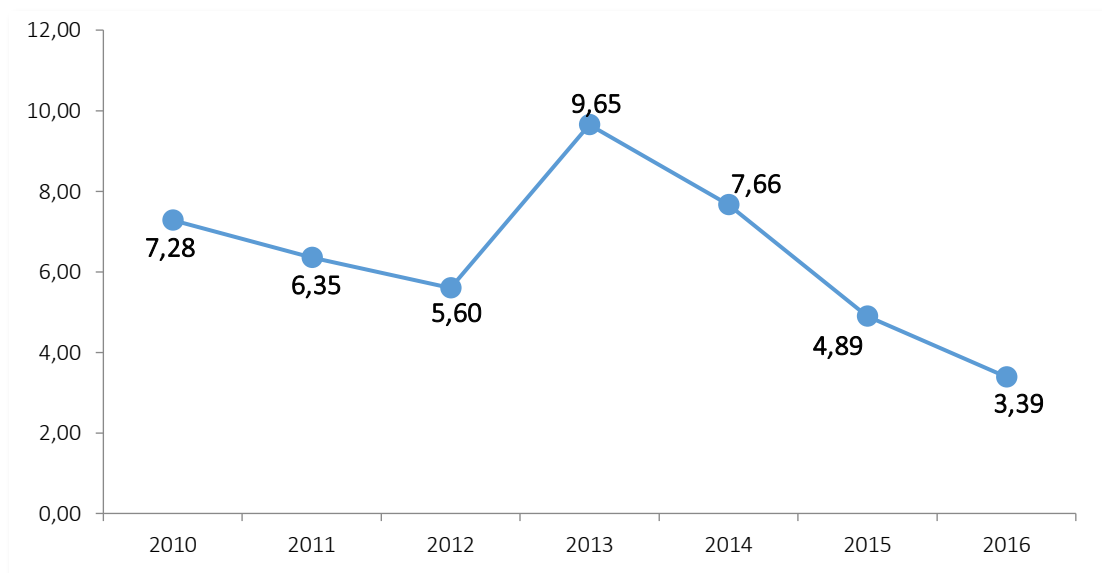
Pada tahun 2016, besaran nilai ekspor luar negeri turun dari Rp. 257 triliun menjadi sebesar Rp. 197,48 triliun. Demikian juga besaran nilai impor luar negeri dari sebesar Rp. 14,56 triliun pada tahun 2015, menjadi sebesar Rp. 65,09 triliun pada tahun 2016. Komoditas ekspor utama Provinsi Kalimantan Timur diantaranya adalah batubara, gas alam, minyak mentah, minyak kelapa sawit/CPO, dan pupuk. Sedangkan, komoditas impor masuk antara lain minyak mentah, mesin, peralatan dan barang konsumsi, serta barang modal.

E. Inflasi

Inflasi dalam ilmu ekonomi merupakan suatu proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus (*continue*). Inflasi merupakan proses dari suatu peristiwa dan bukan tergantung tinggi-rendahnya tingkat harga (artinya tingkat harga dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi). Dalam aplikasinya, inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi.

Inflasi, terkait dengan mekanisme pasar, dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Laju inflasi yang cukup fluktuatif dan tergolong tinggi dalam kegiatan perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.4
Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif dari tahun ke tahun dimana paling tinggi terjadi pada tahun 2013 (9,65%) dan paling rendah di tahun 2016 (3,39%). Rendahnya laju

inflasi pada tahun terakhir ini dipicu oleh beberapa faktor yang menyebabkan kelesuan perekonomian daerah, yaitu: terhambatnya distribusi berbagai komoditas barang dan jasa; kelangkaan beberapa komoditas, baik karena aksi spekulasi/penimbunan barang maupun keterbatasan produksi komoditas tersebut; hingga kebijakan perekonomian nasional yang berdampak pada perekonomian regional.

Laju inflasi di Provinsi Kalimantan Timur dibentuk oleh dua kota Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu Kota Samarinda dan Kota Balikpapan (angka yang dihasilkan masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Utara). Berikut inflasi di setiap kota IHK di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Tabel 3.4
Laju Inflasi Menurut Kota IHK
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016 (persen)

Tahun	Samarinda	Balikpapan	Kalimantan Timur	Nasional
2010	7,00	7,38	7,28	6,96
2011	6,23	6,45	6,35	3,79
2012	4,81	6,41	5,60	4,30
2013	10,37	8,56	9,65	8,38
2014	6,74	7,43	7,66	8,36
2015	4,24	6,26	4,89	3,35
2016	2,83	4,13	3,39	3,02

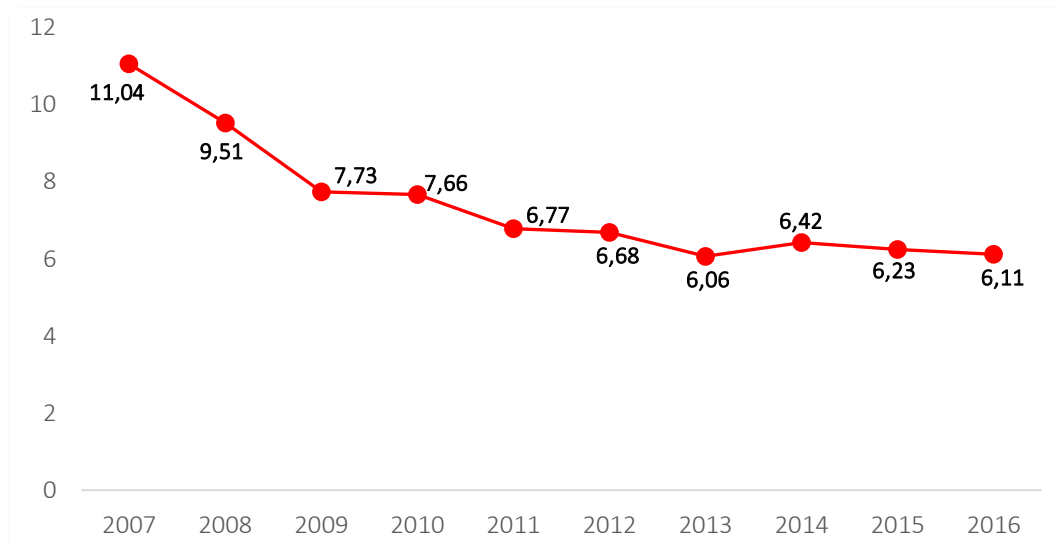
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

F. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan juga merupakan sebuah permasalahan klasik dan kontinyu yang selalu ada dan berkembang di suatu wilayah. Oleh karena itu, tugas utama pemerintah terkait kemiskinan adalah berusaha meminimalisir dan memberdayakan masyarakat sehingga memiliki daya saing dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Indikator yang sangat nyata dalam melihat kemiskinan di suatu wilayah adalah tingkat kemiskinan, yang menyatakan persentase penduduk miskin terhadap keseluruhan penduduk di wilayah tersebut.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur memiliki kecenderungan menurun pada setiap periode pembangunan hingga mencapai angka 6,11 persen pada tahun 2016. Meskipun memiliki kecenderungan menurun, tingkat kemiskinan mulai mengalami kerentanan dalam penurunannya, bahkan mengalami kenaikan pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2013.

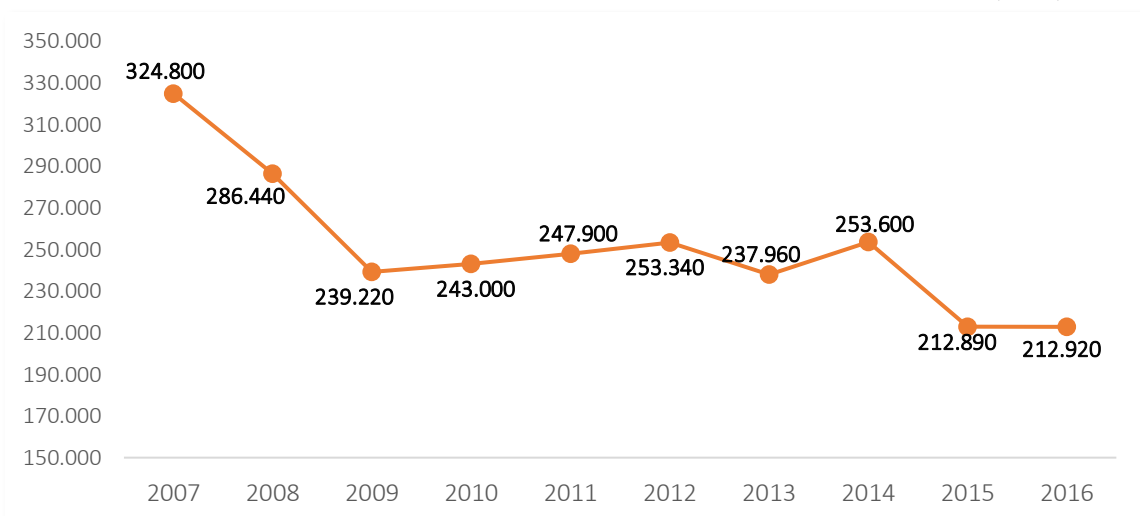
Gambar 3.5
Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2016 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Lain halnya jika dilihat secara absolut, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur memiliki *trend* yang fluktuatif dalam perkembangannya. Pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 212.920 jiwa, artinya secara absolut jumlah penduduk miskin juga turun jika dibanding pada tahun sebelumnya (212.890 jiwa penduduk miskin). Penurunan tingkat kemiskinan maupun jumlah penduduk miskin ini merupakan capaian positif pemerintah daerah, meskipun begitu perlu menjadi perhatian oleh pemerintah provinsi sebagai pengayom masyarakat agar selalu memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan setiap realisasinya berjalan seiring dengan program dari pemerintah pusat.

Gambar 3.6
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2016 (Jiwa)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Perekonomian Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh adanya tren penurunan harga dan permintaan komoditas global sektor mineral dan tambang yang berlangsung sepanjang tahun 2016. Akibatnya, sulit bagi perekonomian Kalimantan Timur untuk melakukan ekspansi usaha pada sektor tersebut dan pada akhirnya, karena adanya dominasi signifikan dari sektor pertambangan dan pergalian terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, sangat besar kemungkinan terjadi perlambatan atau pertumbuhan negatif pada perekonomian Kalimantan Timur secara total.

Tabel 3.5
Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2016

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Ket.
1.	Jumlah Penduduk	Jiwa	3.131.964	3.199.696	3.275.844	3.351.432	3.426.638	3.501.232	Penduduk proyeksi
2.	Pertumbuhan Ekonomi (Th.Dasar 2010)	%	6.30	5.26	2.25	1.71	(1.21)	(0,38)	
3.	Laju Inflasi	%	6.35	5.60	9.65	7.66	4.89	3,39	Gabungan Kaltara
4.	Pendapatan per Kapita (Th. Dasar 2000)	Rp. Juta	58,96	63,74	64,12	61,17	50,63	50,27	Angka Masih dalam Proses
5	Persentase penduduk miskin	%	6,77	6,68	6,06	6,42	6,23	6,11	
6.	Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita	Rp/Bulan	871.251	986.563	1.096.709	1.136.173	1.193.642	1.296.926	-
6.1	Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita	Rp/Bulan	403.719	450.920	508.706	508.801	549.351	587.920	-
6.2	Rata-rata pengeluaran konsumsi non makanan per kapita	Rp/Bulan	467.532	535.643	588.003	627.372	644.291	709.006	-
7.	PDRB per kapita (Th.Dasar 2010)	Rp. Juta	151,37	157,33	158,35	155,14	143,25	144,83	Tahun dasar 2010
8.	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Rp. Milliar & Ribu US\$	16.196 & 1.348.060	7.709 & 2.529.900	18.441 & 1.324.197	12.983 & 2.145.665	9.611 & 2.381.442	6.885.124 & 1.181.859	

Turunnya level permintaan Tiongkok masih menjadi isu terdepan dalam bisnis batubara, khususnya untuk regional Asia. Sebagai importer dan konsumen batubara terbesar di dunia, permintaan Tiongkok memainkan peranan penting dalam pembentukan harga batubara. Pemerintah Tiongkok bahkan memberlakukan kebijakan pemotongan angka produksi sebesar 150 juta ton dan impor sejumlah 50 juta ton dalam menyikapi rendahnya harga di level domestik. Selain kebijakan tersebut efektif per 15 Oktober 2014, Pemerintah Tiongkok juga mulai memberlakukan pajak impor bagi batubara untuk memproduksi penambangan lokal. Perlambatan ekonomi yang terjadi di Tiongkok menjadi penyebab utama tertahannya produksi batubara Kalimantan Timur.

Senada dengan Tiongkok, sentiment negatif juga masih terjadi pada pasar batubara Kalimantan Timur dengan tujuan Korea Selatan. Dalam menyikapi penerapan pajak impor baru, yaitu US\$ 16,2/ton untuk kalori kurang dari 5.000 kc dan US\$18,2 untuk kalori yang lebih dari 5.000 kc, importir Korea mulai mengalihkan review atas pajak tersebut, khususnya untuk batubara dengan kalori yang banyak dikonsumsi, yakni 3.800 kc NAR. Importir mengusulkan agar khusus untuk kalori tersebut pajaknya ditambah menjadi US\$ 14,2/ton namun tampaknya review ini tidak ditanggapi oleh pemerintah. Perkembangan ekspor batubara Kalimantan Timur masih dapat terbantu dengan peningkatan batubara di India, meskipun relatif masih terbatas.

Dari sisi migas, berdasarkan hasil liaison diindikasikan bahwa sampai dengan awal 2015 penurunan *lifting* diperkirakan masih akan terus terjadi. Penurunan ini merupakan dampak belum adanya kepastian perpanjangan salah satu blok migas. Sentimen positif yang menjadi pendukung sedikit tertahannya kontraksi di sektor pertambangan migas, terutama karena mulai berproduksinya beberapa proyek migas dengan total produksi sekitar 615 mmscf.

Dari sisi fiskal, penurunan harga minyak dan batubara di pasar Internasional juga berpotensi menurunkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya DBH Sumber Daya Alam. Penurunan kapasitas fiskal tersebut menjadi faktor yang menghambat pemerintah dalam mempercepat infrastruktur di Kalimantan Timur.

Penurunan yang diperkirakan terjadi di sektor pertambangan dapat ditahan atau paling tidak diminimalisir dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan melalui upaya perbaikan pada sektor-sektor diluar sektor berbasis SDA. Indikator pertumbuhan ekonomi Non Migas dan Batubara menunjukkan angka positif (1,52 persen) di tahun 2016, hal ini menunjukkan bahwa terdapat peluang peningkatan kinerja ekonomi melalui percepatan kinerja pada sektor berbasis non SDA. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong peningkatan kinerja sektor berbasis non SDA dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur secara keseluruhan.

Peningkatan kinerja sektor pertanian dilakukan dengan adanya program penguatan ketahanan pangan, pembangunan proyek infrastruktur strategis, dan berkembangnya industri pengolahan nonmigas. Perekonomian Kalimantan Timur juga akan didorong oleh sektor pengadaan listrik yang diperkirakan terus meningkat dalam dua tahun ke depan seiring dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam rencana usaha dan bisnis PT PLN melalui pembangunan berbagai pembangkit listrik. Dari sisi fiskal, meskipun dana transfer pusat mengalami penurunan, namun proporsi pendapatan asli daerah justru semakin meningkat.

Dari sisi harga pergerakan inflasi Kalimantan Timur 2016 diperkirakan masih mendapatkan tekanan, baik dari sisi kebijakan pemerintahan maupun dari faktor non-fundamental seperti gangguan cuaca yang menyebabkan gangguan pada stok pangan dan distribusi, mengingat

Kalimantan Timur masih bergantung dari daerah lain. Resiko inflasi yang disebabkan oleh pangan masih cukup tinggi mengingat prognosa produksi pertanian di Kalimantan Timur masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan di Kalimantan Timur. Ketergantungan pada daerah lain masih menjadi andalan di tengah resiko cuaca ekstrim dan naik turunnya gelombang laut untuk mendukung kelancaran distribusi. Optimalisasi utilitas pelabuhan menjadi faktor kunci dalam menjaga kelancaran distribusi yang merupakan faktor penting dalam pengendalian inflasi. Selain bahan makanan, konsumsi *durable goods* masyarakat diperkirakan akan mengalami kenaikan di akhir tahun sesuai dengan pola historis dimana konsumsi barang tahan lama cenderung meningkat di akhir tahun. Program pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan dan mendorong terwujudnya swasembada pangan, serta meningkatnya *awareness* pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya inflasi akan menjaga stabilitas inflasi di Kalimantan Timur.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018

Melihat perkembangan perekonomian Kalimantan Timur tahun 2015-2016, proyeksi perekonomian tahun 2017, perekonomian Kalimantan Timur pada Tahun 2018 dan tahun-tahun berikutnya diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif. Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kalimantan Timur serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut :

A. Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kalimantan Timur masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup :

- 1) Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
- 2) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah tantangan cukup besar bagi pemerintah dewasa ini mengingat investasi merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi

daerah. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah dilakukan pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi.

- 3) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial.
- 4) Meningkatkan daya saing ekspor, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekspor yang tinggi. Tingginya pertumbuhan ekspor diperlukan tidak saja sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga untuk merangsang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan bermutu.
- 5) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
- 6) Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung oleh kelembagaan yang memadai, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2016 dan perkiraan tahun 2017 serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha-usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah :

Pertama, menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban yang kondusif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah;

Kedua, meningkatkan pelayanan perijinan usaha;

Ketiga, menyediakan infrastruktur perekonomian yang cukup dan berkualitas untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah;

Keempat, pemberdayaan ekonomi UMKM dan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai institusi melalui jaringan sistem keuangan mikro;

Kelima, memperbaiki modal sosial khususnya etos kerja dalam rangka peningkatan produktivitas kerja;

Keenam, efisiensi alokasi sumber daya dan dana dalam perekonomian daerah;

B. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017-2018

Ekonomi Kaltim Tahun 2017 dan 2018 diperkirakan akan terus mengalami perbaikan namun masih terbatas. Dari dalam negeri, RDMP yang saat ini tengah dilakukan oleh PT. Pertamina (persero) diperkirakan akan menjadi salah satu factor pendorong peningkatan perekonomian Kalimantan Timur Tahun 2017 dan 2018 khususnya pada sektor konstruksi dan PMTB. Disisi lain, APBD tahun 2017 provinsi Kalimantan Timur tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan anggaran tahun sebelumnya sehingga kemampuan fiskal Kalimantan Timur Tahun 2017 diperkirakan sangat terbatas. Peran regional investor relation unit yang telah dibentuk sejak akhir tahun 2015, diharapkan dapat menciptakan persepsi positif bagi calon investor untuk selanjutnya dapat menjadi sumber pembiayaan alternative bagi pembangunan ekonomi Kalimantan Timur.

Dari sisi eksternal ekspor luar negeri diperkirakan mengalami perbaikan pada tahun 2017 dan 2018, namun masih berada dalam fase kontraksi. Relaksasi kebijakan pengurangan hari kerja disektor pertambangan kembali menjadi 330 hari pertahun ditargetkan berakhir pada akhir maret 2017 oleh pemerintah tiongkok. Dengan demikian, import batubara Tiongkok diperkirakan akan kembali mengalami peningkatan pasca berakhirnya relaksasi kebijakan. Sementara itu ekspor batubara ke india diperkirakan mengalami hambatan menyusul komitmen pemerintah India untuk mengurangi impor batubara dan beralih menggunakan batubara domestik. Kejadian ini ditempuh oleh pemerintah India karena kondisi saat ini terjadi surplus pasokan yang cukup tinggi.

Berdasarkan hasil perhitungan indeks harga ekspor (IHEx) Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, harga komoditas ekspor tahun 2017 dan 2018 akan meningkat. IHEx Kalimantan Timur tumbuh diperkirakan tumbuh positif pada tahun 2017 dan 2018 yang didorong oleh perbaikan harga komoditas migas. Sementara itu, harga batubara diperkirakan masih tumbuh positif pada tahun 2017 dan 2018 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa pengamat ekonomi memperkirakan bahwa perbaikan harga batubara internasional setelah diberlakukan kebijakan restriksi produksi batubara domestic hanya temporer, tidak bersifat fundamental.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian daerah tahun 2016 dan perkiraan tahun 2017, maka prospek perekonomian pada Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan akan terus membaik, setelah tahun 2016 kinerja sektor ekonomi mulai membaik setelah terjadinya penurunan drastis pada tahun 2015. Perekonomian diharapkan kembali tumbuh pada tahun 2017 sebesar $0,5\pm 1\%$ dan pada Tahun 2018 mampu tumbuh $0,5\pm 1\%$.
- 2) Inflasi pada tahun 2017 dan 2018 diperkirakan pada kisaran $4\pm 1\%$

Dengan kondisi di atas, diharapkan tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2018 dapat dijaga pada kisaran 7,00%, angka kemiskinan pada tahun 2018 sebesar 6,00%.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah pada periode-periode sebelumnya merupakan gambaran bagaimana pemerintah daerah merealisasikan pembangunan daerah dengan kemampuan pendanaan yang ada. Salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah adalah dengan melihat derajat otonomi fiskal yang dihitung melalui ukuran kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perangkat Daerah (PD) merupakan satuan entitas akuntansi dalam pemerintahan daerah sehingga memiliki tanggung jawab terhadap anggarannya masing-masing termasuk dalam pencatatan akuntansi. Realisasi dari penggunaan anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Biro Keuangan Sekda Prov Kaltim dan secara administratif harus dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD), yaitu Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing PD.

Dari segi pengawasan terhadap rangkaian pengelolaan keuangan daerah periode tahun-tahun sebelumnya, disusunlah laporan keuangan oleh Biro Keuangan sebagai entitas pelaporan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan inilah yang kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana pengelolaan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh setiap Perangkat Daerah dan dikoordinir oleh Biro Keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca, hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh perangkat daerah sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh Biro Keuangan sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan

Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, Laporan Arus Kas disusun secara sentralistik oleh Biro Keuangan.

Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2013 dapat dikatakan telah berhasil dengan hasil opini audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berupa “Wajar Tanpa Pengecualian”. Namun pada tahun 2014, opini BPK tersebut menurun kategorinya menjadi “Wajar Dengan Pengecualian” yang mengindikasikan terjadinya penurunan performa pelaporan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Penurunan hasil opini BPK terhadap laporan keuangan daerah perlu menjadi perhatian penting mengingat fokus utama reformasi birokrasi salah satunya adalah tertib administrasi yang mengindikasikan meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah.

3.2.1.1. Pendapatan Daerah

Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu tahun 2013-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.6, dimana analisis terhadap perkembangan pendapatan daerah secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut.

Meskipun rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah mencapai -12,36 persen. Penurunan ini dipicu oleh menurunnya hampir seluruh unsur-unsur pendapatan daerah, kecuali lain-lain pendapatan yang sah, DAK dan pendapatan hibah dari kelompok masyarakat yang peningkatannya tidak signifikan. Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari pajak daerah dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak terutama dari sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki sumbangan perekonomian terbesar di Kalimantan Timur.

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -11,49%. Secara umum, selama kurun waktu empat tahun terakhir, unsur-unsur PAD menunjukkan penurunan yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mulai tahun 2014 tumbuh sebesar 13,24%, tahun 2015 turun sebesar 25,72%, dan tahun 2016 turun sebesar 20,78% sehingga rata-rata pertumbuhan PAD berada pada kisaran -9,86%. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat berada pada tingkat sedang.

Realisasi penerimaan dana perimbangan pun terus mengalami penurunan selama kurun waktu empat tahun terakhir dengan rata-rata penurunan sebesar 9,24 persen. Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak yang juga turun sebesar 18,32%.

Secara totalitas realisasi anggaran dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah rata-rata pertumbuhannya juga turun sebesar 24,73 persen.

Tabel 3.6
Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2016 (Realisasi)

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata Pertum- buhan
I	Pendapatan Daerah	11.631.697.051.829	11.287.300.941.021	8.999.519.970.923	7.987.877.780.773	-11,49%
1.	Pendapatan Asli Daerah	5.885.262.003.582	6.664.586.023.490	4.484.753.878.953	4.031.514.706.408	-9,86%
1.1	Pajak Daerah	4.929.791.598.766	5.429.125.998.687	3.753.718.935.815	3.127.250.928.432	-12,47%
1.2	Retribusi Daerah	33.676.707.132	15.494.252.850	14.722.788.428	19.435.790.560	-8,99%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	291.684.072.009	310.199.925.478	230.816.057.794	167.385.377.650	-15,57%
1.4	Lain-lain PAD yang sah	630.109.625.673	909.765.846.475	485.496.096.914	717.442.609.764	15,17%
2	Dana Perimbangan	5.335.759.149.747	4.253.320.982.625	4.024.025.055.410	3.941.626.961.365	-9,24%
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak	5.272.171.973.247	4.194.970.542.625	3.805.373.705.410	2.844.821.387.413	-18,32%
2.2	DAU	55.539.336.500	57.312.515.000	-	80.402.179.000	-
2.3	DAK	8.047.840.000	1.037.925.000	218.651.350.000	1.016.403.394.952	7.081,32%
2.4	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-
2.5	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-
3	Lain-Lain PAD yang sah	410.675.898.500	369.393.934.905	490.741.036.560	14.736.113.000	-24,73%
3.1	Pendapatan Hibah	16.045.173.000	16.781.978.000	11.404.893.000	9.736.113.000	-14,03%
3.2	Dana Penyesuaian	394.630.725.500	352.611.956.905	479.336.143.560	5.000.000.000	-24,56%

Sumber : data diolah

3.2.1.2. Belanja Daerah

Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana untuk belanja daerah. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Proporsi realisasi penggunaan belanja daerah dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7
Penggunaan Anggaran Belanja Daerah (Realisasi)

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	Rata - Rata Pertum- buhan
5.1	Belanja Tidak Langsung	7.103.434.643.017	6.414.604.671.509	5.734.343.715.948	4.031.278.537.206	-16,67%
5.1.1	Belanja Pegawai	779.583.156.002	930.549.932.815	942.463.194.421	874.380.273.544	4,47%
5.1.4	Belanja Hibah	1.567.763.966.225	909.317.897.000	966.801.166.000	844.687.442.500	-16,10%
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.940.000.000	4.249.500.000	4.410.500.000	3.459.990.000	-3,30%
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.692.808.046.400	2.563.201.309.381	2.440.676.447.219	3.459.990.000	-36,48%
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	2.059.339.474.390	2.005.786.032.312	1.376.558.162.630	861.148.428.162	-23,80%
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	1.500.000.000	3.434.245.678	1.250.000.000	
5.2	Belanja Langsung	6.676.810.264.458	4.860.027.165.524	3.964.706.259.506	3.569.963.801.653	-18,53%
5.2.1	Belanja Pegawai	568.035.668.614	494.596.159.995	281.455.610.472	454.630.639.016	1,84%
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.457.692.779.178	2.154.150.620.058	1.688.776.168.500	1.543.518.535.349	-14,19%
5.2.3	Belanja Modal	3.651.081.816.665	2.211.280.385.471	1.994.474.480.532	1.571.814.627.287	-23,48%
Jumlah Belanja		13.780.244.907.476	11.274.631.837.034	9.699.049.975.455	7.601.242.338.859	-17,93%
Proporsi Belanja Tidak Langsung (%)		51,55	56,89	59,12	46,97%	
Proporsi Belanja Langsung (%)		48,45	43,11	40,88	53,03%	

Secara umum, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu empat tahun terakhir mengalami penurunan/efisiensi. Pada tahun 2016, realisasi belanja yang digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar 46,97 persen dan 53,03 persen untuk belanja langsung. Hal ini menandakan bahwa porsi penggunaan anggaran pembangunan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat semakin besar.

Secara umum, rata-rata penurunan realisasi belanja tidak langsung mencapai 16,67 persen selama empat tahun terakhir dan penurunan belanja langsung rata-rata 18,53%. Analisis terhadap realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dikaji dari informasi pada Tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (juta Rupiah)

No	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
1	2012	1.514.854	11.339.765	13.36%
2	2013	1.696.672	12.900.000	13.15%
3	2014	1.587.234	12.217.683	12.99%
4	2015	1.223.918	9.699.058	12,19%
5	2016	1.329.010	7.601.242	17,48%

Dari Tabel 3.8 diatas dapat dilihat persentase proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 13,36 persen hingga 12,19 persen pada tahun terakhir. Selain disebabkan total penerimaan daerah yang terus menurun, yang disebabkan karena upaya pemerintah untuk lebih memprioritaskan belanja publik untuk memenuhi sarana dan parasarana dasar kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 17,48%.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah, seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah, yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti: honorarium guru, tenaga medis, dan belanja sejenis lainnya.

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan. Informasi realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3.9. Analisis terhadap realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 2010-2014 (data tahun 2014 merupakan target belanja) dapat dijelaskan antara lain:

1. Pertumbuhan rata-rata total realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama periode tahun 2010-2014 adalah sebesar 1,80 persen. Kenaikan ini dikarenakan belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk pengeluaran

belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama cenderung meningkat.

2. Pertumbuhan rata-rata total belanja tidak langsung adalah sebesar 76,92 persen. Dalam pengecekannya, perhitungan kenaikan ini disebabkan oleh adanya kecenderungan meningkatnya semua unsur belanja tidak langsung, terlebih lagi meningkatnya unsur belanja bagi hasil yang dominan, baik dari sisi jumlah dana maupun persentase.
3. Pertumbuhan rata-rata total belanja langsung turun sebesar 3,10 persen yang disebabkan karena semua unsur belanja langsung cenderung meningkat.

Tabel 3.9
Realisasi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib
dan Mengikat Serta Prioritas Utama Provinsi Kalimantan Timur (Juta Rupiah)

NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	Rata -Rata Pertum- buhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	Belanja Tidak Langsung	2.782.161	3.063.571	3.617.431	3.289.765	2.252.577	-3,10%
1	Gaji dan Tunjangan	345.849	465.048	467.878	414.013	414.233	5,90%
2	Tambahan Penghasilan PNS	290.737	323.347	354.834	421.576	380.197	7,49%
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	12.740	13.621	15.268	13.482	11.795	-1,30%
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Prov.upate n/Kota dan Pemerintah Desa	2.132.835	2.261.555	2.779.451	2.440.676	1.446.352	-6,00%
B.	Belanja Langsung	50.749	48.227	48.227	194.396	212.990	76,92%
5	Belanja honorarium PNS khusus Guru dan Tenaga Medis		-	-	-	-	
6	Belanja Beasiswa tugas belajar PNS	35.818	28.695	37.765	18.040	17.735	-10,55%
7	Belanja Jasa Kantor	14.931	19.532	23.914	57.891	90.979	63,12%
	- Belanja Air	5.283	4.645	4.914	4.230	4.366	-4,25%
	- Belanja Listrik	4.445	5.302	6.281	32.730	33.199	115,07%
	- Belanja Surat Kabar/ Majalah	3.145	3.485	4.336	2.891	33.199	262,57%
	- Belanja Kawat /Faksimili/ Internet	2.059	6.100	14.105	6.626	8.316	74,99%
	- Belanja Sewa Gedung	-	-		11.414	11.899	

NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	Rata -Rata Pertum- buhan
8	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	-	-		10.574	13.297	
C.	Pembiayaan pengeluaran				50.000	-	
9	Pembentukan Dana Cadangan	-	-				
10	Pembayaran Pokok Utang	-	-				
TOTAL		2.521.950	2.847.842	3.131.330	3.665.658	2.465.567	1,80%

3.2.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Berikut dapat dilihat perkembangan defisit anggaran.

Tabel 3.10
Defisit Riil Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
1.	Pendapatan	11.904.245	11.631.697	11.287.300	8.999.519	7.987.877	-99,09%
Dikurangi Realisasi							
2.	Belanja Daerah	11.339.765	13.780.244	11.274.631	9.699.049	7.601.242	-8,07%
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	202.800	-	25.000	50.000	-	-
Defisit Riil (Realisasi)		361.6801	(2.148.547)	(12.330)	(749.530)	386.635	1.392,12%

Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa komposisi penutup defisit anggaran belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur seluruhnya ditutup dari Sumber Pembiayaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran tahun sebelumnya. SiLPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan. SiLPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya.

Tabel 3.11
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur

NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertum- buhan
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	3.198.903	1.050.356	1.038.125	287.098	613.319	-6,76%
1.	Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-			
2.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	-	-			
3.	Pelampauan penerimaan lain- lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-			
4.	Sisa penghematan Belanja atau akibat lainnya	3.198.903	1.050.356	1.038.125	287.098	613.319	-6,76%
5.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-			

Sumber : Data Diolah

3.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendanaan program dan kegiatan selama pelaksanaan pembangunan daerah periode tahun 2018 sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya (2012-2016), dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program dan kegiatan pada periode pembangunan tahun 2018.

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Salah satu indikator keuangan daerah tersebut adalah daya pajak (*tax effort*), yaitu perbandingan PAD terhadap kapasitas PAD. Kapasitas PAD sama dengan potensi PAD, yaitu pendapatan yang diterima apabila seluruh potensi digunakan secara optimal, dalam hal ini secara umum menggunakan nilai PDRB.

3.2.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Analisis terhadap pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lain-lain);

3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
4. Kebijakan di bidang keuangan negara.

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Artinya, perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal dana perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi, dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan.

Pendapatan Daerah dibagi menurut kelompok pendapatan yang meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD.

Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, sedangkan Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Tabel 3.12
Target dan Proyeksi Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2018

URAIAN	TARGET TAHUN 2017	PROYEKSI TAHUN 2018
PENDAPATAN	8.098.899.980.000	6.643.300.000.000
A. Pendapatan Asli Daerah	3.987.452.610.000	3.994.215.043.000
I. Pajak Daerah	3.034.590.000.000	3.110.000.000.000
II. Retribusi Daerah	23.133.125.000	25.838.100.000
III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	161.561.830.000	172.348.061.481
IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	768.167.655.000	686.028.881.519
B. Dana Perimbangan	4.092.045.370.000	2.637.101.957.000
I. Bagi Hasil Pajak	762.711.562.000	683.000.000.000
II. Bagi Hasil Bukan Pajak	1.545.912.562.000	1.312.000.000.000
III. Dana Perimbangan Lainnya	1.783.421.246.000	642.101.957.000
a. Dana Alokasi Umum	649.653.899.000	642.101.957.000
b. Dana Alokasi Khusus	1.133.767.347.000	
C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	19.402.000.000	11.983.000.000
I. Pendapatan Hibah	11.902.000.000	11.983.000.000
II. Dana Penyesuaian Otonomi khusus	7.500.000.000	-

3.2.2.2. Target dan Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat

Tabel 3.13
Target dan Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2018

No	URAIAN	TARGET TAHUN 2017	PROYEKSI TAHUN 2018
A	Belanja Tidak Langsung	3.487.018.532.451	3.870.045.138.573
1	Gaji dan Tunjangan	1.830.002.532.451	1.827.127.938.573
2	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Provupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.583.213.000.000	1.630.400.000.000
3	Belanja Hibah dan Bansos wajib	37.250.000.000	104.964.200.000
4	Belanja bantuan keuangan Prov/kab/kota dan Pemdes	1.553.000.000	1.553.000.000
5	Pilkada	20.00.000.000	286.000.000.000
6	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	5.000.000.000
B	Belanja Langsung	1.393.546.394.175	2.548.760.970.930
1	Belanja MYC	695.846.394.175	1.570.015.241.030
a)	Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda	297.335.033.234	727.946.410.516
b)	Pembangunan Bandara Samarinda Baru	256.087.515.833	109.029.690.850
c)	Pembangunan Jembatan Mahakam 4	43.417.964.000	125.391.838.460
d)	Pembangunan Jalan mendekat Perekat Jembatan	34.300.542.287	393.466.415.730
e)	Pembangunan SPAM Maloy	30.978.515.720	120.163.363.000
f)	Pembangunan Pipa transmisi Sekerat Maloy	33.726.823.101	95.210.622.474
2	Belanja BLUD	697.700.000.000	602.000.000.000
a)	RSUD AWS Samarinda	470.200.000.000	378.000.000.000
b)	RSUD Kanujoso Djatiwibowo	204.000.000.000	204.000.000.000
c)	UPTD LabKes Dinkes	3.500.000.000	4.000.000.000
d)	RSJD Atma Husada	20.000.000.000	16.000.000.000
3	Dana Reboisasi dan Pendampingan, dana oprasional Retribusi		165.824.529.900
C	Pembiayaan Pengeluaran	-	
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	
2	Pembayaran Pokok Utang	-	
3	Kewajiban Pinjaman Daerah	-	
Total		5.216.312.310.945	6.418.806.111.930

Sumber : data diolah

3.2.2.3. Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan

Rencana pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2018 dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan, baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perencanaan tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada anggaran pendapatan tahun 2018 sangat bergantung dengan kondisi perekonomian Nasional, daerah, regional maupun lokal, serta ekonomi global yang saat ini sedang terjadi keguncangan perekonomian dan cukup berefek pada skala internasional.

Dalam jangka panjang, pembangunan Kalimantan Timur berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari dana perimbangan, terutama yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak yang diperoleh dari bagi hasil minyak dan gas alam dan royalti dari sektor pertambangan umum, sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengandalkan pada Pajak Daerah, terutama melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya pada sektor-sektor potensial. Seiring dengan peningkatan pendapatan penduduk, pemerintah juga melakukan penataan pelayanan dan perluasan obyek pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan suasana kondusif untuk mendukung berkembangnya investasi di Kalimantan Timur.

Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi data belanja wajib dan mengikat, dapat disusun kapasitas riil keuangan daerah pada tahun 2017-2018 seperti tabel berikut:

Tabel 3.14

Target dan Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2018

No.	URAIAN	TARGET TAHUN 2017	PROYEKSI TAHUN 2018
1	Pendapatan	8.098.900.000.000	6.643.300.000.000
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-	-
	Total Penerimaan	8.098.900.000.000	6.643.300.000.000
	Dikurangi		
4	Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat	5.216.312.310.945	6.418.806.111.930
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	2.882.587.689.055	224.493.888.070

Sumber : data diolah

3.2.2.4. Proyeksi Belanja Daerah

Rencana belanja tahun 2018 diarahkan kepada komponen-komponen penyediaan anggaran yang merupakan kewajiban-kewajiban daerah dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah.

Adapun rencana belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 sebesar Rp.6.643.300.000.000,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.870.045.141.000,- dan Belanja Langsung Rp. 2.773.254.859.000,- selanjutnya dapat dilihat tabel 3.15.

Tabel 3.15
Struktur Belanja Tahun 2017 dan Rencana Tahun 2018

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2017	RENCANA TAHUN 2018
1	PENDAPATAN	8.098.900.000.000	6.643.300.000.000
2	BELANJA	8.098.900.000.000	6.643.300.000.000
2.1	Belanja Tidak Langsung	5.290.162.945.000	3.870.045.141.000
	2.1.1. Belanja Pegawai	1.961.725.841.770	1.827.127.941.000
	2.1.2. Belanja Subsidi	-	-
	2.1.3. Belanja Hibah	865.658.700.000	385.464.200.000
	2.1.4. Belanja Sosial	5.010.000.000	5.500.000.000
	2.1.5. Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota	1.825.627.075.000	1.630.400.000.000
	2.1.6. Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	617.141.328.230	1.553.000.000
	2.1.7. Belanja Tak Terduga	15.000.000.000	20.000.000.000
2.2	Belanja Langsung	3.033.372.855.000	2.773.254.859.000
	2.2.1. Belanja Pegawai	273.003.556.950	186.243.275.128
	2.2.2. Belanja Barang & Jasa	1.274.016.599.100	1.052.700.661.322
	2.2.3. Belanja Modal	1.486.352.698.950	1.534.310.922.550
	Surplus / Defisit	-	-

Sumber : data diolah

3.2.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2018 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
2. Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. Sedangkan DAU dan DAK diasumsikan sama dengan alokasi tahun 2017;
3. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah di Kalimantan Timur, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan system informasi data mengenai objek wajib pajak, manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui peningkatan dan *perluasan* obyek, intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
3. Pendayagunaan asset daerah;
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya; dan
5. Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian target penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2018, beberapa kegiatan Intensifikasi yang dilakukan, antara lain:

1. Bidang Pajak Daerah

A. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan kebijakan:

- 1) Membangun Layanan Publik berbasis IT melalui *system online* se-Kalimantan Timur, khususnya pembayaran PKB pada kantor bersama Samsat.
- 2) Menambah kantor samsat pembantu/unit pelayanan pada daerah-daerah yang sulit terjangkau dari kantor induk, terutama di daerah pesisir dan daerah perbatasan.
- 3) Pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan sanksi administrasi bagi kendaraan bermotor tahun pembuatan 2005 ke bawah.
- 4) Menyediakan sarana mobilitas Samsat Jelajah.
- 5) Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif Progresif sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- 6) Membangun *counter-counter* pelayanan pada mall/pusat perbelanjaan di Balikpapan, Samarinda, dan Bontang, termasuk menyediakan layanan *payment point* dengan menggunakan jasa perbankan (Bank Kalimantan Timur) sampai ke tingkat pedesaan.
- 7) Menyediakan *Speed Boat Delivery Order* yang ditempatkan di Pelabuhan KPLP, Mangkupalas, Harapan baru, dan Sungai Lais, serta penyediaan sepeda motor *Delivery Order* untuk menjangkau wajib pajak di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh roda 4.
- 8) Dispenda sudah berkerjasama dengan Universitas Mulawarman untuk menempatkan mobil Samsat Kampus.
- 9) Meningkatkan mutu layanan berstandar ISO di seluruh kantor bersama Samsat.

- 10) Meningkatkan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait dalam rangka mengintensifikasi penerimaan.
 - 11) Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pada PDE Dispenda.
 - 12) Melakukan Kegiatan operasional/razia lapangan pendataan di seluruh Kab/Kota se-Kalimantan Timur.
- B. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan kebijakan:
- 1) Mengintensifikasikan penelitian persyaratan untuk menjaring BBN II terhadap kendaraan yang sudah dipindahtangankan.
 - 2) Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah kepada para dealer dan agen tunggal pemegang *merk* termasuk badan *leasing*.
 - 3) Melakukan kegiatan penagihan dan pendataan terhadap perusahaan pengguna alat berat/besar yang beroperasi di Kalimantan Timur.
 - 4) Membuat kebijakan pemberian insentif pengurangan BBNKB bagi Wajib Pajak yang bernomor polisi luar daerah Kalimantan Timur untuk memutasikan ke Nomor Polisi Kalimantan Timur dalam bentuk Peraturan Gubernur.
 - 5) Pemberian keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor jenis *Dump Truck* yang tidak menggunakan jalan umum.
 - 6) Membangun Layanan Publik berbasis IT melalui sistem online se-Kalimantan Timur, khususnya pembayaran PKB pada kantor bersama Samsat.
 - 7) Meningkatkan kerjasama dengan dinas/instansi terkait dalam rangka mengintensifikasi.
 - 8) Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pada PDE Dispenda.
 - 9) Melakukan kegiatan operasional/razia lapangan pendataan diseluruh Kab/Kota se-Kalimantan Timur.
- C. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan kebijakan:
- 1) Memberlakukan tarif tunggal sebesar 7,5 persen secara penuh sesuai Perda Nomor 01 Tahun 2011.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (BPH-Migas, Kemendagri & Kemenkeu) terhadap penyaluran BBM di Kalimantan Timur.
 - 3) Menginstruksikan kepada seluruh penyedia BBM yang beroperasi di Kalimantan Timur wajib untuk memiliki izin wajib pungut (WAPU) yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur.
 - 4) Melakukan audit terhadap seluruh penyedia BBM atas penjualan BBM yang membayar PBBKB.

- 5) Melakukan kegiatan pendataan dan pemberian nomor NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) bagi setiap agen penjualan BBM.
 - 6) Melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan yang berlaku kepada seluruh penyedia BBM secara berkala, termasuk melakukan rekonsiliasi penilaian dan penjualan BBM di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- D. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dengan kebijakan:
- 1) Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertambangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - 2) Melakukan kegiatan operasional terpadu secara berkala setiap triwulan.
 - 3) Mengaktifkan tim intensifikasi pada tingkat Kabupaten/Kota.

Khusus untuk pajak Air Bawah Tanah pada tahun 2011 kewenangan pemungutan dilakukan oleh Kabupaten/Kota.

2. Bidang Retribusi Daerah, dengan kebijakan:

- A. Merumuskan seluruh kebijakan yang menjadi dasar pungutan.
- B. Mengadakan monitoring dan bimbingan teknis pungutan dalam setiap penyetoran.
- C. Memberikan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik dalam rangka penertiban pungutan.
- D. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi atas pungutan bidang Retribusi Daerah dengan instansi.
- E. Melakukan sosialisasi pungutan Retribusi Daerah secara terpadu dengan instansi terkait.
- F. Memotivasi Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana senantiasa meningkatkan pelayanan yang memberikan kontribusi peningkatan Penerimaan Asli Daerah.

3.2.3.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat, seperti belanja pegawai, menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan;
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Belanja bagi hasil pada kabupaten/kota merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan dana perimbangan (DAU yang telah dikurangi oleh belanja pegawai), sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

4. Belanja Multi Years Contract;
5. Belanja Wajib Tenaga Pendidikan dan Kependidikan sebagai amanah dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana kewenangan pendidikan menengah atas menjadi kewenangan dan tanggung jawab provinsi;
6. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
7. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap PD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.
8. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan yang digunakan untuk **Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Kesejahteraan yang Adil dan Merata** yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pemberdayaan sektor usaha kecil dan menengah serta penguatan daya saing daerah melalui program-program peningkatan daya saing investasi.
9. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai 31 program prioritas pembangunan tahun 2018.
10. Mendukung program dan kegiatan strategis yang terkait dengan prioritas nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.

Adapun rencana dan proyeksi struktur belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.16
Rencana Struktur Belanja Daerah Tahun 2017-2018

URAIAN		JUMLAH	
		APBD Tahun 2017	Rencana Tahun 2018
1	Pendapatan	8.098.900.000.000	6.643.300.000.000
2	Belanja	8.098.900.000.000	6.643.300.000.000
2.1.	Belanja tidak langsung	5.290.162.945.000	3.870.045.141.000
2.2.	Belanja Langsung	2.808.737.055.000	2.773.254.859.000
Surplus / Defisit		-	-

Sumber : data diolah

Belanja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018, meliputi:

1. Peningkatan kualitas system penyelenggaraan pendidikan terkait peningkatan mutu pendidik /tenaga kependidikan terutama Pendidikan Menengah Atas, sesuai dengan peraturan perundangan diprioritaskan pada jenjang pendidikan menengah;

2. Percepatan pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja dan penyediaan infrastruktur dasar permukiman bagi masyarakat miskin;
3. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja dengan mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah;
4. Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan daya beli masyarakat dengan mengembangkan pasar dan distribusi barang/produk sebagai stok komoditi pokok barang strategis sehingga efisiensi perdagangan dalam negeri dapat ditingkatkan;
5. Percepatan transformasi ekonomi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan penataan struktur industri, kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan, meningkatkan kerjasama perdagangan;
6. Pengembangan Agribisnis dalam kaitannya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas dengan meningkatkan produktivitas perkebunan, perluasan komoditas perkebunan non sawit, dan pengembangan produksi budidaya dan penguatan daya saing produk perikanan;
7. Peningkatan produksi pangan dengan peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, pengembangan perikanan tangkap, peningkatan produksi peternakan, dan pengembangan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
8. Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan dengan pengembangan ketenagalistrikan sehingga meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan;
9. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dengan pembangunan jalan tol, peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan, pengendalian banjir, penyediaan air baku, pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan, peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat laut udara dan ASDP, Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan jembatan dan jaringan irigasi wilayah I,II,III;
10. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan peningkatan pelayanan publik; dan
11. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui perlindungan atmosfer dan perubahan iklim, dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Lindung.

3.2.3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2017, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang

daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun sebelumnya.

Dalam RKPD Tahun 2018 konsep penganggaran yang diterapkan adalah konsep penganggaran berimbang dimana jumlah rencana belanja disesuaikan dengan prediksi pendapatan. Dengan kata lain pada tahun 2018 pembiayaan baik penerimaan maupun pengeluaran ditetapkan tidak ada. Hal ini sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dengan mempertimbangkan kecenderungan adanya sisa lebih penyerapan anggaran tahun 2017 diupayakan seminimal mungkin dan jika ada akan dimanfaatkan pada anggaran perubahan.

Tabel 3.17
Proyeksi Pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2018

No	URAIAN	JUMLAH	
		APBD Tahun 2017	Rencana RPJMD Tahun 2018
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (silpa)	-	-
2.	Pencairan dana cadangan	-	-
3.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian -Pinjaman	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-
1.	Pencairan Dana Cadangan	-	-
2.	Penyertaan modal (investasi) daerah	-	-
3.	Pembayaran pokok utang	-	-
4.	Pemberian pinjaman daerah	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	-	-

Sumber: Data diolah

Guna mempercepat peran pemerintah dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah, Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya dalam **menggali sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan potensi daerah yang ada**, demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Alternatif kebijakan lainnya yang saat ini masih di kaji untuk dikembangkan di Kalimantan Timur adalah pelaksanaan program Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau *Public Private Partnership* (PPP) serta pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta dilakukan melalui skema *Public Private Partnership* (PPP) atau selanjutnya disebut sebagai Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dan skema *Corporate Social Responsibility* (CSR). Melihat karakteristik ekonomi Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah yang memiliki SDA melimpah serta dengan keberadaan jumlah perusahaan

Internasional maupun nasional yang cukup banyak, potensi dana CSR merupakan salah satu poin yang perlu diperhatikan kemanfaatannya dengan terus mendapat dukungan dari semua pihak terkait.